Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi VI
Minggu ke-2 Februari
(4 s.d. 10 Februari 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

DUKUNGAN MEMPERKUAT UMKM

Yosephus Mainake
Peneliti Pertama
yosephus.mainake@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemberdayaan UMKM di Indonesia merupakan salah satu komitmen Pemerintah. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional sekaligus sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19, UMKM harus diselamatkan dari keterpurukan. Hal ini karena UMKM memegang peranan penting dengan kontribusinya yang mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Saat ini yang dibutuhkan oleh UMKM adalah penyaluran kredit untuk mencukupi kebutuhan permodalan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), jumlah UMKM, saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Sektor usaha ini juga mampu menyerap sebesar 97% dari total tenaga kerja, serta dapat menghimpun sampai dengan 60,42% dari total investasi di Indonesia. Sayangnya kontribusi UMKM tersebut belum diikuti dengan besarnya penyaluran kredit yang masih berkutat di angka 20%. Faktor penyebabnya antara lain karena sulitnya persyaratan pengajuan kredit dan usaha yang tidak memenuhi ketentuan layak untuk mendapatkan kredit perbankan.

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik tahun 2020, sekitar 69,02% UMKM mengalami kesulitan permodalan di saat pandemi Covid-19. Sementara, menurut laporan pengaduan ke Kemenkop UKM per Oktober 2020, sebanyak 39,22% sektor UMKM mengalami kesulitan permodalan selama pandemi Covid-19.

Dalam rangka membantu UMKM terdampak pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diantaranya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dukungan UMKM. Pada tahun 2021, program PEN Dukungan UMKM mengalokasikan anggaran sebesar Rp96,21 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM, antara lain Subsidi Bunga (KUR dan Non-KUR), Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP). Selain itu, terdapat pula dukungan tambahan berupa pembebasan rekening minimum, biaya beban dan abodemen listrik yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM.

Tercatat sampai 31 Desember 2021, total realisasi PEN Dukungan UMKM untuk tahun 2021 sebesar Rp83,19 triliun dengan jumlah debitur/UMKM sebanyak 34,59 juta. Pada tahun 2022 Pemerintah kembali meningkatkan plafon KUR menjadi Rp373,17 triliun untuk mendorong sektor UMKM dan memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR 3% yang diberikan sampai Juni 2022.

Dalam rangka meningkatkan rasio pembiayaan UMKM oleh perbankan, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. PBI ini mengatur rasio kredit perbankan ke sektor UMKM menjadi paling sedikit sebesar 30% pada 2024. yang dilakukan secara bertahap, yaitu 20% pada 2022, 25% pada 2023, dan 30% pada 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, perbankan telah menyiapkan beberapa strategi bisnis, seperti BNI pada 2022 mendorong untuk meningkatkan rasio kredit UMKM hingga 30% yang disertai dengan program pembinaan dan pendampingan sebagai upaya membantu pelaku UMKM naik kelas sekaligus mampu menembus pasar ekspor.

Atensi DPR

Saat ini UMKM penyaluran kredit perbankan untuk mencukupi kebutuhan permodalan. Mengingat UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara , maka DPR RI melalui Komisi VI yang ruang lingkup tugasnya meliputi UMKM perlu mengajak pemerintah bersama-sama mencari solusi agar UMKM dapat memperoleh kredit perbankan dan rasio kredit perbankan untuk UMKM sebesar 30% pada 2024 dapat terwujud.

DPR RI melalui Komisi VI mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh perbankan, khususnya perbankan milik BUMN, bersama pemerintah yang telah mengupayakan memperbesar penyaluran kredit bagi UMKM. DPR RI dan Pemerintah mendorong UMKM di masa pandemic covid-19 agar tetap memanfaatkan berbagai platform belanja yang ada sehingga diharapkan pada tahun 2024 bertambah hingga mencapai 30 juta pelaku usaha dari 12 juta pelaku usaha yang ikut saat ini sebagaimana yang dicita-citakan pemerintah.

Sumber

Bisnis Indonesia, 7 Februari 2022
BKPM.go.id, diakses 7 Februari 2022
Ekon.go.id, diakses 8 Februari 2022
Media Indonesia, 7 dan 9 Februari 2022
Republika, 7 Februari 2022

Minggu ke-2 Februari
(4 s.d. 10 Februari 2022)
2022

©CopyrightPuslitBK2022